

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA DI SD NEGERI 2 SOKARAJA TENGAH TAHUN 2023

Abbyad Al Jadid¹, Ariesta Amanda², Chamid Sutikno³, Zaula Rizqi Atika⁴, Indah Ayu Permana Pribadi⁵

Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto

Email: almanafabby@gmail.com¹, ariestaamanda92@gmail.com², c.sutikno@unupurwokerto.ac.id³, zr.atika@unupurwokerto.ac.id⁴, iap.pribadi@unupurwokerto.ac.id⁵

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan P5 di SDN 2 Sokaraja Tengah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Sumber data dalam penelitian ini terdiri data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di SDN 2 Sokaraja Tengah. Analisis data yang digunakan yakni menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari : reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Adapun fokus penelitian ini disesuaikan dengan teori George Edward III, yakni : aspek komunikasi, aspek sumberdaya, aspek disposisi, dan aspek struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SDN 2 Sokaraja Tengah menunjukkan aspek komunikasi yang baik melalui kejelasan, transmisi, dan konsistensi informasi, meskipun terdapat tantangan dalam pemahaman guru mengenai dan komunikasi berkelanjutan dengan orang tua. Aspek sumberdaya, sumber daya manusia dinilai cukup dengan komitmen guru yang tinggi, namun pemahaman konsep P5 dan ketersediaan modul ajar masih menjadi kendala. Sumber anggaran P5 didukung oleh dana BOS dan partisipasi wali murid secara transparan, sementara ketersediaan sarana dan prasarana masih terbatas tetapi diatasi dengan inovasi dan kolaborasi. Aspek disposisi, pelaksana kebijakan, terutama kepala sekolah menunjukkan komitmen tinggi dan sikap mendukung, mendorong kolaborasi aktif meskipun menghadapi kendala sarana dan pemahaman P5. Aspek struktur birokrasi dalam pelaksanaan P5 di SDN 2 Sokaraja Tengah telah berjalan dengan baik, didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur, meskipun pemahaman detail SOP belum menyeluruh di kalangan warga sekolah. Secara keseluruhan, implementasi P5 di SDN 2 Sokaraja Tengah efektif dan terstruktur, namun memerlukan penguatan dalam pemahaman konseptual dan teknis P5, serta peningkatan sarana prasarana.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Profil Pancasila.

Abstract – This study aims to determine how the implementation of the P5 policy is at SDN 2 Sokaraja Tengah. The method used in this study is descriptive qualitative and the selection of informants is done using the Purposive Sampling technique. The data sources in this study consist of primary and secondary data obtained through interviews, observations and documentation. This study was conducted at SDN 2 Sokaraja Tengah. The data analysis used is according to Miles and Huberman which consists of: data reduction, data presentation, and conclusions. The focus of this study is adjusted to the theory of George Edward III, namely: communication aspects, resource aspects, disposition aspects, and bureaucratic structure aspects. The results of the study indicate that the Implementation of the Pancasila Student Profile Strengthening Project Policy at SDN 2 Sokaraja Tengah shows good communication aspects through clarity, transmission, and consistency of information, although there are challenges in teacher understanding and ongoing communication with parents. Aspects of resources, human resources are considered sufficient with high teacher commitment, but understanding the concept of P5 and the availability of teaching modules are still obstacles. The P5 budget source is supported by BOS funds and transparent participation of parents, while the availability of facilities and infrastructure is still limited but is overcome with innovation and collaboration. In terms of disposition, policy implementers, especially the principal, show high commitment and supportive attitudes, encouraging active collaboration despite facing obstacles in facilities and understanding of P5. The aspect of the bureaucratic structure in the implementation of P5 at SDN 2 Sokaraja Tengah has been running well, supported by clear and structured Standard Operating Procedures (SOPs), although understanding of the details of the SOP is not yet

comprehensive among school residents. Overall, the implementation of P5 at SDN 2 Sokaraja Tengah is effective and structured, but requires strengthening in the conceptual and technical understanding of P5, as well as improving facilities and infrastructure.

Keywords: *Implementation, Public Policy, Pancasila Pfofile.*

PENDAHULUAN

Implementasi merupakan bagian dari proses kebijakan publik, disamping tahapan sebelumnya agenda setting, formulation, adoption, dan tahapan sesudahnya assesement. Implementasi adalah tahapan dalam suatu proses kebijakan publik, pada umumnya implementasi diterapkan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Tahap implementasi ini secara khusus menjadi salah satu strategi dalam menjalankan suatu kebijakan dari organisasi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan yang lebih efektif dari proses sebelumnya (Kusumanegara Solahuddin, 2010 dalam Sutikno, C 2022). Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan proses dalam menentukan kebijakan publik. Implementasi kebijakan mencakup tindakan publik atau individu yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Implementasi kebijakan melibatkan mekanisme pembuatan sistem kebijakan yang dirancang secara spesifik sesuai program yang akan di realisasikan (Rahmat, 2015 dalam Sutikno, C 2020). Oleh sebab itu, implementasi kebijakan publik adalah aspek penting atas keseluruhan proses kebijakan yang dapat menggambarkan adanya keterkaitan perumusan dan implementasi kebijakan. Tindakan dalam proses implementasi harus di koordinasikan dengan tujuan dan tugas yang ditetapkan dalam proses perancangan strategi yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan sumber daya (Markiewicz, 2011 dalam Sutikno, C 2020).

Pendidikan menjadi salah satu isu dalam kebijakan publik, yang mana pemerintah dapat membuat produk kebijakan melalui lembaga pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu masalah atau isu publik yang terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat karena memiliki pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia baik secara individu maupun sosial. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan pendidikan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan sebagai reaksi dari munculnya berbagai permasalahan pendidikan yang menjadi perhatian publik, juga sebagai pedoman bertindak dan solusi serta inovasi guna mencapai visi misi pendidikan oleh pemerintah maupun aktor lainnya yang mengurus pendidikan. Pendidikan merupakan hak setiap individu sebagai warga Negara Indonesia dalam memperoleh kecerdasan, dimana kebijakan ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berisi "setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan" dan dilanjutkan dalam ayat 3 yang menjelaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan mengadakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan bertakwa sekaligus berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan perundang-undangan. (Desi, 2023).

Dalam memperoleh mutu pendidikan yang layak, pemerintah mengeluarkan peraturan RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, peraturan ini berisikan usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu perencanaan dari kesempatan belajar yang dimaksud supaya mengajak peserta didik kepada perubahan yang didambakan dan mengevaluasi hingga sampai mana perubahan tersebut sudah terjadi pada diri peserta didik. Pengembangan kurikulum akan selalu terjadi dalam pendidikan Indonesia. Di Indonesia pengimplementasian kurikulum telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan yaitu tahun 1947, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1973, tahun 1975, tahun 1984, tahun 1994, tahun 1997 (revisi kurikulum 1994), tahun 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), dan kurikulum 2006 (Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan), dan pada tahun 2013 pemerintah melalui kementerian pendidikan nasional mengganti kembali menjadi kurikulum 2013 (Kurtilas) dan pada tahun 2022 (Kurikulum Merdeka)" (Ulinniam et al., 2021) (dalam Rahayu et al., 2022).

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, dunia digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi generasi muda. Akses mudah terhadap informasi, interaksi melalui media sosial, serta kemajuan teknologi komunikasi telah membentuk cara pandang dan perilaku individu di era modern. Namun, seiring dengan dampak positif yang ditawarkan oleh dunia digital, muncul pula tantangan dalam membangun karakter yang kuat dan beretika di kalangan generasi muda Putri Yulianti (2024) dalam Muhtar Hidayat (2024). Menurut Munir (2008) dalam Agung Prihatmojo (2020) sisi positif dari adanya perkembangan teknologi tersebut pun menjadikan mobilitas yang dilakukan oleh manusia lebih mudah dan lebih canggih dalam segala hal. Dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah degradasi moral.

Degradasi moral sering terjadi di lingkungan sekolah dasar. Guru sekolah dasar sering menjumpai siswa yang berbohong, tawuran, melakukan tindakan bullying, mencuri, pemerkosaan, pembunuhan, sikap tidak sopan santun terhadap guru dan kakak kelas dalam berbicara, dan eksistensi berlebihan di media sosial selayaknya orang dewasa. Degradasi moral siswa di sekolah dasar paling mengkhawatirkan yaitu 68 persen siswa sekolah dasar sudah aktif mengakses konten porno Zubaidah (2013) dalam Agung Prihatmojo (2020).

Tabel 1. Data Jumlah Kasus Kekerasan dari tahun 2021-2024

NO	Bentuk Kekerasan	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1.	Seksual	10.327	11.682	13.156	14.459	49.624
2.	Psikis	7.901	9.018	9.050	9.800	35.769
3.	Fisik	9.603	9.541	10.500	11.372	41.016
4.	Penelantaran	2.514	2.880	2.763	2.588	10.745
5.	Eksplorasi	338	290	368	386	1.382
6.	Trafficking	683	476	458	471	2.088

Sumber: Data diolah oleh penulis (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam SIMFONI PPA)

Dari data diatas merupakan jumlah kasus kekerasan dari tahun 2021- 2024. Jumlah kasus kekerasan tertinggi yaitu kekerasan seksual dengan jumlah 49.624 kasus dan jumlah kasus kekerasan terendah yaitu kekerasan eksploitasi dengan jumlah 1.362 kasus. Dari adanya berbagai bentuk kekerasan, degradasi moral juga terjadi pada Tingkat Pendidikan yang diantaranya meliputi Tingkat perguruan tinggi, SMA, SMP, SD, TK, dan PAUD:

Tabel 2. Data Korban Kekerasan Bidang Pendidikan pada tahun 2021-2024

NO	Pendidikan	2021	2022	2023	2024	Jumlah
1.	Perguruan Tinggi	2.015	2.431	2.477	2.761	9.684
2.	SMA	7.955	8.511	9.612	10.033	27.111
3.	SMP	5.945	6.574	7.597	8.396	28.512
4.	SD	4.883	5.828	6.915	7.178	24.084
5.	TK	410	296	0	0	706
6.	PAUD	150	96	0	0	246
7.	TK/PAUD	0	177	725	820	1.722
8.	Tidak/belum pernah sekolah	1.675	1.988	2.253	2.439	8.355
9.	Tidak diketahui	4.096	3.782	2.914	2.925	13.717

Sumber: Data diolah oleh penulis (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam SIMFONI PPA)

Data diatas merupakan korban kekerasan pada bidang Pendidikan pada tahun 2021-

2024. Berdasarkan tabel, korban kekerasan dalam bidang Pendidikan Tingkat Sekolah Dasar sebagai peringkat ketiga setelah Tingkat SMA dan SMP dengan total jumlah 24.084 korban. Sedangkan tingkat PAUD sebagai korban kekerasan paling sedikit dengan jumlah 246 korban.

Degradasi moral di Indonesia menjadi fenomena umum (Sudiarta & Porro, 2023). Penyimpangan sosial mulai dari hal kecil seperti memakai pakaian yang tidak pantas sebagai pelajar, datang terlambat, minuman keras, mencuri, bullying, pergaulan bebas, penggunaan narkoba, tawuran, kekerasan, hingga hal yang besar seperti terjadinya kasus-kasus pembunuhan di dunia pendidikan Indonesia saat ini dapat dengan mudah dilihat melalui berbagai media. Dengan demikian, dapat diketahui, bahwa pada pendidikan di Indonesia sekarang ini tengah terjadi degradasi moral (Revelina et al, 2023).

Sebagai respon perkembangan zaman dan juga adanya ragam degradasi moral di atas maka kini pemerintah mengkonsep dan mulai melaksanakan kurikulum baru yang disebut kurikulum merdeka. Kurikulum secara sempit dapat dimaknai sebagai serangkaian rencana dalam suatu sekolah yang di dalamnya mencakup visi, misi, tujuan, model pembelajaran, strategi hingga metode pembelajarannya. Di Indonesia telah silih berganti perubahan kurikulum, saat ini menerapkan kurikulum merdeka sebagai ganti kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengasah minat dan bakat anak sejak dini dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Pada awalnya kurikulum ini diuji cobakan pada 2.500 sekolah penggerak hingga terus berkembang ke ribuan sekolah lainnya (Kemendikbud, 2022). Terdapat beberapa poin utama perubahan dari kurikulum 2013 di antaranya yaitu adanya perubahan skema indikator menjadi capaian pembelajaran (CP), RPP menjadi modul ajar. Dalam penilaian terdapat istilah baru yaitu formatif dan sumatif (Zakso, 2023). Selain itu dalam kurikulum ini juga terdapat skema Fase dari fase A hingga F. Setiap fase menunjukkan cakupan kelas berdasarkan capaian pembelajarannya. Fase tersebut berlangsung dari kelas 1 SD hingga kelas 3 SMA/SMK sederajat.

Kurikulum merdeka sejatinya juga sebagai bentuk respon akan tantangan global dan perkembangan zaman yang senantiasa berubah. Perubahan tersebut menuntut terwujudnya peserta didik yang tangguh dan unggul. Ketangguhan tersebut tidak sekadar dilihat dari kemampuan pengetahuannya tetapi aspek karakter pula. Untuk itu dalam kurikulum merdeka ini memuat program penguatan karakter melalui pembentukan Profil Pelajar Pancasila dengan tujuan membentuk karakter peserta didik yang unggul dengan bermuara pada landasan dasar negara Pancasila. Untuk penyempurnaan pendidikan karakter Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim telah menjadikan Profil Pelajar Pancasila sebagai salah satu Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Adapun yang melatarbelakangi munculnya Profil Pelajar Pancasila adalah kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan.

Kurikulum Merdeka hadir sebagai solusi atas adanya degradasi moral pada generasi muda di Indonesia. Tujuan utama dari Kurikulum ini adalah mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuhkembangkan cipta, rasa dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila (Kemendikbud 2024). SDN 2 Sokaraja Tengah sudah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak awal pemerintah membuat kurikulum baru. Dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka di SDN 2 Sokaraja Tengah masih terdapat permasalahan dalam proses pengimplementasian P5. Berikut adalah data bimbingan

dan konseling karakter siswa kelas V di SDN 2 Sokaraja Tengah tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. Data Bimbingan dan Konseling Karakter Siswa Kelas V SDN 2 Sokaraja Tengah 2023

No	Permasalahan	Bentuk Bimbingan	Jenis Bimbingan	Kelas
1.	Mengambil uang	Individu	Individu	V
2.	Berkelahi	Individu	Individu	V
3.	Membully	Individu	Individu	V
4.	Berkata kasar	Individu	Individu	V
5.	Merusak fasilitas	Individu	Individu	V

Sumber: Data diolah oleh penulis

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang dilakukan oleh peserta didik di SDN 2 Sokaraja Tengah, permasalahan tersebut diantaranya: Mengambil uang, berkelahi, membully, berkata kasar, merusak fasilitas. Penerapan P5 yang dilakukan di SDN 2 Sokaraja Tengah memiliki potensi besar dalam mengatasi permasalahan degradasi moral. Dengan fokus pada pembentukan karakter holistik, pembelajaran kontekstual, dan penguatan nilai-nilai Pancasila, P5 dapat menjadi alat yang efektif untuk menanamkan fondasi moral yang kuat pada siswa. Namun keberhasilan implementasi P5 dalam konteks ini sangat bergantung pada desain proyek yang tepat, pemahaman guru yang mendalam, keterlibatan aktif siswa dan orang tua, serta evaluasi yang komperhensif. Dengan mengatasi tantangan dan memaksimalkan potensi P5, diharapkan siswa-siswa yang sudah menerapkan P5 dapat menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan berkontribusi pada lingkungan yang lebih baik.

Pada pasal 16 ayat 5-7 dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Kurikulum Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah menjelaskan bahwa Proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan pembelajaran kolaboratif lintas disiplin ilmu dalam mengamati, mengeksplorasi, dan merumuskan solusi terhadap isu atau permasalahan nyata yang relevan bagi Peserta Didik. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya Satuan Pendidikan dan Peserta Didik. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dikembangkan oleh Satuan Pendidikan mengacu pada panduan yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas di bidang Kurikulum.

SD Negeri 2 Sokaraja Tengah merupakan salah satu lembaga pendidikan tingkat dasar yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka di SD Negeri 2 Sokaraja Tengah dilaksanakan sejak tahun 2022 yaitu sejak awal adanya kebijakan tersebut. Berikut adalah data nama Sekolah Dasar pelaksana Kurikulum Merdeka:

Tabel 4. Data Nama Sekolah Dasar Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) di Kecamatan Sokaraja

No	Nama Satuan Pendidikan	Kelurahan/Desa	Status
1	SDN 1 Banjaranyar	Banjaranyar	Negeri
2	SDN 2 Banjaranyar	Banjaranyar	Negeri
3	SDN Banjarsari Kidul	Banjarsari Kidul	Negeri
4	SD Al- Falah Banjarsari Kidul Sokaraja	Banjarsari Kidul	Swasta
5	SDN Jompo Kulon	Jompo Kulon	Negeri
6	SDN Kalikidang	Kalikidang	Negeri
7	SDN 1 Karangduren	Karangduren	Negeri
8	SDN 2 Karangduren	Karangduren	Negeri
9	SDN 1 Karangkedawung	Karangkedawung	Negeri
10	SDN 2 Karangkedawung	Karangkedawung	Negeri

11	SDN 3 Karangnanas	Karangnanas	Negeri
12	SDN 1 Karangnanas	Karangnanas	Negeri
13	SDN 2 Karangnanas	Karangnanas	Negeri
14	SDN Karangrau	Karangrau	Negeri
15	SDN Kedondong	Kedondong	Negeri
16	SDN 2 Klahang	Klahang	Negeri
17	SDN 1 Klahang	Klahang	Negeri
18	SDN Lemberang	Lemberang	Negeri
19	SDN 2 Pamijen	Pamijen	Negeri
20	SDN 1 Pamijen	Pamijen	Negeri
21	SDN Sokaraja Kidul	Sokaraja Kidul	Negeri
22	SD Kristen Sokaraja	Sokaraja Kidul	Swasta
23	SDN 3 Sokaraja Kulon	Sokaraja Kulon	Negeri
24	SDN 4 Sokaraja Kulon	Sokaraja Kulon	Negeri
25	SDN 2 Sokaraja Kulon	Sokaraja Kulon	Negeri
26	SDN 1 Sokaraja Kulon	Sokaraja Kulon	Negeri
27	SD IT Annida Sokaraja	Sokaraja Kulon	Swasta
28	SDN Sokaraja Lor	Sokaraja Lor	Negeri
29	SDN 2 Sokaraja Tengah	Sokaraja Tengah	Negeri
30	SDN 1 Sokaraja Tengah	Sokaraja Tengah	Negeri
31	SD IT Top Kids	Sokaraja Tengah	Swasta
32	SD NU Master Sokaraja	Sokaraja Tengah	Swasta
33	SDN 2 Sokaraja Wetan	Sokaraja Wetan	Negeri
34	SDN 1 Sokaraja Wetan	Sokaraja Wetan	Negeri
35	SDN Wiradadi	Wiradadi	Negeri
36	SD IT Mutiara Ilmu	Wiradadi	Swasta

Sumber : Kurikulum.kemdikbud.go.id

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Sekolah Dasar yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka di Kecamatan Sokaraja sebanyak 36 Sekolah Dasar. SDN 2 Sokaraja Tengah adalah salah satu sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka belajar, diketahui bahwa SDN 2 Sokaraja Tengah sudah menerapkan kurikulum merdeka belajar dimulai pada tahun pelajaran 2021. Kurikulum merdeka belajar pada tahun 2023 di SDN 2 Sokaraja Tengah dilaksanakan secara bertahap dengan pengimplementasian pada kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5.

Pada tahun 2023 SDN 2 Sokaraja Tengah menjadi sekolah rujukan dalam pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan yang diikuti oleh peneliti selama empat bulan mulai dari tanggal 14 Agustus – 14 Desember 2023. AMSP adalah salah satu bentuk kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar di luar kampus dengan mengajar di sekolah. MBKM merupakan program dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi.

Salah satu komponen integral dari Kurikulum Merdeka adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). P5 dirancang untuk mengembangkan kompetensi esensial yang harus dimiliki oleh peserta didik, meliputi: keimanan, keberagaman global, semangat gotong royong, kemandirian, kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, merupakan ciri khas penerapan kurikulum merdeka yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya.

Keberhasilan penerapan P5 sangat bergantung pada kesiapan guru, guru memiliki peran penting dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan P5. Kesiapan guru meliputi persiapan perangkat pembelajaran,

penguasaan materi, serta kemampuan mengelola pembelajaran berbasis proyek. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, guru dituntut untuk berinovasi dan menciptakan suasana belajar yang mendukung keterlibatan aktif siswa, sehingga mereka dapat menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dengan baik. Sayangnya, banyak guru, terutama di Tingkat Sekolah Dasar, masih menghadapi tantangan dalam memahami dan mengimplementasikan P5.

(Maudyna, et al., 2023 dalam Rahayu, L et.al 2024) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kendala dan tantangan terbesar dalam Kurikulum Merdeka yang dihadapi oleh pengajar sebagai sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembelajaran adalah perencanaan perangkat pembelajaran untuk Capaian Pembelajaran (CP), Tujuan Pembelajaran (TP) dan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP). Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang memadai, serta keterbatasan modul dan panduan yang jelas. Kesiapan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka tidak hanya sebatas memahami materi, tetapi juga menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan melakukan evaluasi yang tepat. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang lebih besar dari pemerintah, baik dalam bentuk pelatihan intensif maupun pendampingan, agar para guru dapat melaksanakan kurikulum ini dengan optimal. Tujuan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah untuk mendidik siswa agar lebih kompeten, berakarakter, dan bertindak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila (Pramesti et al., 2024).

SDN 2 Sokraja Tengah mengambil tema mengenai “Kearifan Lokal”. Di era digitalisasi ini, integrasi pendidikan berbasis kearifan lokal ke dalam pembelajaran menjadi lebih mudah dan efektif. Kearifan lokal dalam pendidikan berperan penting dalam melestarikan dan mengembangkan potensi lokal sebagai keunggulan daerah. Dengan memasukkan elemen-elemen budaya setempat ke dalam kurikulum, diharapkan peserta didik dapat mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya lokal di lingkungannya Tilaar 2017 (dalam Randi 2024). SDN 2 Sokaraja Tengah mengambil tema yaitu “kearifan lokal”, harapannya siswa-siswi karakternya dapat terbentuk dengan adanya pemilihan tema tersebut. Dimana siswa-siswi dapat belajar mandiri mengenal keaneka ragam budaya di Indonesia. Tentunya siswa-siswi diuntut untuk saling bekerja sama, jujur, saling support, saling menghargai, tanggung jawab serta rasa cinta pada tanah air dalam proses pengimplementasian P5 di sekolah. Dengan adanya proses pengembangan karakter siswa tentunya diharapkan untuk bisa mencegah adanya degradasi moral menyeluruh terhadap peserta didik di SDN 2 Sokaraja Tengah.

Salah satu pengimplementasian kurikulum merdeka belajar di SDN 2 Sokaraja Tengah adalah dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila melalui beberapa kegiatan seperti kegiatan pembiasaan dan pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik. Dengan adanya hal ini karakter siswa diharapkan terbentuk yaitu menghargai kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar, toleransi yang tinggi, dan memiliki pemikiran yang kritis terhadap suatu hal. Penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini masih dalam proses perkembangan, sehingga Pendidikan berusaha mengarahkan murid untuk berfokus kepada prosesnya bukan hasil yang didapat. serta rasa cinta pada tanah air dalam proses pengimplementasian P5 di sekolah. Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya penerapan profil pelajar pancasila di SDN 2 Sokaraja Tengah:

Tabel 5. Kegiatan dalam Upaya penerapan profil pelajar Pancasila di SDN 2 Sokaraja Tengah

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Literasi asmaul husna	Semua siswa
2.	Do’a Bersama sebelum pembelajaran	Semua siswa
3.	Pojok baca	Kelas 1, 2, 4, dan kelas 5
4.	Upacara hari senin	Guru dan siswa
5.	Jum’at sehat	Guru dan siswa

6.	Penerapan budaya 5S	Guru dan siswa
7.	Outing Class	Kelas 5

Sumber: Data diolah oleh penulis

Dari adanya kegiatan tersebut diharapkan siswa dapat saling menghargai, supaya dapat menanamkan nilai karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya program dilaksanakan melalui pembelajaran yang berbasis pembuatan proyek, diantaranya:

Tabel 6. Kegiatan pembelajaran berbasis proyek di SDN 2 Sokaraja Tengah

No	Kegiatan	Keterangan
1.	Tari berkelompok	Kelas 5 dan kelas 2
2.	Musik ansambel berkelompok	Kelas 4
3.	Kelompok bernyanyi	Kelas 1
4.	Pembuatan kerajinan	Kelas 1, 2, 4, dan kelas 5
5.	Pengenalan dan membuat makanan tradisional	Kelas 5

Sumber: Data diolah oleh penulis

Dengan adanya proses pembelajaran berbasis proyek peserta didik berlatih menjadi lebih mandiri, berlatih bagaimana saling bekerja sama, menghargai, tanggung jawab serta rasa cinta pada tanah air akan keanekaragaman budaya yang ada seperti mengetahui berbagai jenis lagu daerah dan berbagai jenis tarian dari berbagai daerah.

Pengimplementasian P5 di SDN 2 Sokaraja Tengah melalui tiga tahapan penting yaitu, perencanaan, pengembangan, dan implementasi. Di SDN 2 Sokaraja Tengah masih terdapat kendala pada SDM dan sarana dan prasarannya. Dari adanya kendala tersebut muncul permasalahan yaitu, kurangnya pemahaman guru terhadap pelaksanaan P5, beberapa guru belum memahami dengan baik konsep P5 mengakibatkan adanya perbedaan pendapat antar guru, cara menyusun modul ajar kurang matang, mengakibatkan implementasi program yang kurang konsisten dan tidak terarah serta pada tahapan pelaksanaan P5. Selain itu terdapat kendala dari segi sarana dan prasarana seperti media pembelajaran yang kurang memadai dan perlengkapan pendukung kegiatan Gebyar P5 kurang lengkap. Dengan adanya kondisi seperti ini maka guru dan siswa memiliki keterbatasan baik dalam tahap pembelajaran P5 maupun gebyar P5.

Berdasarkan deskripsi masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA”. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan P5 di SDN 2 Sokaraja Tengah.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut (Surakhmad 1990:147 dalam Azizah, 2016.) metode deskriptif merupakan metode yang membicarakan cara untuk memecahkan masalah yang aktual, dengan cara mengumpulkan data, menyusun, dan menginterpretasikannya. Sementara penelitian yang bersifat kualitatif menurut (Moelong 2005:6 dalam Azizah, 2016) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk menjawab pertanyaan terkait tentang Implementasi Kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SD Negeri 2 Sokaraja Tengah. Pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang bersifat deskriptif untuk dapat menjelaskan mengenai kondisi nyata atau fakta-fakta yang terjadi terkait dengan masalah yang akan diselidiki. Peneliti mengambil lokasi penelitian di SDN 2 Sokaraja Tengah.

Data primer ini bisa berupa hasil wawancara dengan subjek, hasil angket, hasil tes, dan sebagainya (Nasution, 2023). Data primer diperoleh oleh peneliti dengan melakukan wawancara terhadap Kepala SD Negeri 2 Sokaraja Tengah, guru, siswa yang menerima Pendidikan Kurikulum Merdeka. Sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen, Data Sekunder, merupakan data yang bukan didapatkan atau diperoleh dari subjek penelitian atau sumber pertama yang digunakan untuk penelitian. Data sekunder penelitian ini yaitu melakukan observasi di SDN 2 Sokaraja Tengah (Nasution, 2023).

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam laporan magang ini yakni teknik Purposive Sampling. Menurut (Sugiyono 2011 dalam Mariam, 2016) purposive sampling, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Artinya peneliti dengan sengaja memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Sampel pada penelitian ini diambil secara sengaja berdasarkan karakteristik, ciri, dan sifat yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu Kepala SDN 2 Sokaraja Tengah, guru, siswa, dan wali murid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Sokaraja Tengah yang merupakan lembaga pendidikan formal terakreditasi A di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pelaksana P5 sejak tahun 2020. SDN 2 Sokaraja Tengah beralamat di Jalan Krida Mandala Nomor 17, Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. SD Negeri 2 Sokaraja Tengah berdiri pada tanggal 08 Maret 1952, dengan luas tanah 4229 M² dan luas bangunan 2.359 M². Pada tahun 2023, pengimplementasian P5 di SDN 2 Sokaraja Tengah yang menggunakan Kurikulum Merdeka terdiri dari kelas 1, 2, 4, dan kelas 5.

Implementasi Kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di SDN 2 Sokaraja Tengah Tahun 2023

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahap penting dalam proses perumusan kebijakan publik. Tahap ini mencakup berbagai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mewujudkan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Implementasi kebijakan sebagai serangkaian proses setelah fase penetapan suatu program yang ditujukan pada realisasi konkret dari tujuan kebijakan publik (Umar, Zulkarnain. 2018 dalam Sutikno, C, et al 2023).

Penerapan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) merupakan salah satu pilar utama dalam transformasi sistem pendidikan di Indonesia melalui Kurikulum Merdeka. Konsep P5 tidak muncul secara terisolasi, melainkan sebagai respons strategis terhadap kebutuhan untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan globalisasi dan dinamika perubahan sosial yang semakin kompleks. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila secara resmi pertama kali diterapkan pada tahun pelajaran 2021/2022. Implementasi awalnya dilakukan melalui Program Sekolah Penggerak (PSP). PSP adalah inisiatif Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertujuan untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan di sekolah yang menjadi "penggerak" perubahan Rahayuningsih, 2022.

Profil Pelajar Pancasila merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di Indonesia yang mana mengedepankan pada pembentukan karakter. Pada era kemajuan teknologi globalisasi saat ini, peran pendidikan nilai dan karakter sangat dibutuhkan demi memberikan keseimbangan antara perkembangan teknologi dan perkembangan manusianya (Faiz & Kurniawaty, 2022). Penguatan profil pelajar Pancasila memfokuskan pada penanaman karakter juga kemampuan dalam kehidupan sehari-hari

ditanamkan dalam individu peserta didik melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga Budaya Kerja Rahayuningsih, 2022. Hal tersebut sesuai jawaban dari pertanyaan besar dalam sistem pendidikan di Indonesia. Profil pelajar Pancasila dibuat sebagai jawaban dari satu pertanyaan besar, tentang kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Kompetensi tersebut antara lain kompeten, memiliki karakter juga bertingkah laku mengacu pada nilai-nilai Pancasila Makarim, 2022. Penguatan proyek profil pelajar Pancasila saat ini mulai di terapkan di satuan pendidik melalui program sekolah penggerak (PSP) baik jenjang SD, SMP, dan juga SMA/SMK. Program Sekolah Penggerak berupaya mendorong satuan pendidikan melakukan transformasi sebagai upaya peningkatan mutu pembelajaran di sekolah salah satunya dengan menerapkan kurikulum prototipe (Syafi'i, 2021).

Program Profil Pelajar Pancasila sebagai pendidikan karakter pada kurikulum merdeka merupakan inovasi untuk meningkatkan pendidikan karakter pada kurikulum sebelumnya, karena Proyek Peningkatan Profil Pelajar Pancasila merupakan pembelajaran berbasis proyek, sehingga anak dapat lebih aktif, interaktif dan kontekstual untuk secara langsung mendapatkan pengalaman di sekitarnya dan dapat memperkuat nilai-nilai kepribadian dalam profil pribadi pelajar Pancasila. Kegiatan proyek peningkatan Profil Pelajar Pancasila diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan identitas bangsa Indonesia untuk melaksanakan pendidikan melalui kegiatan Proyek Peningkatan Profil Pelajar Pancasila. Program ini mengangkat Profil Pelajar Pancasila dalam jangka panjang untuk melestarikan identitas nasional yang positif sejak usia dini. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila hadir untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dalam situasi yang menyenangkan, interaktif dan terlibat langsung dengan lingkungan sekitar sehingga relevan dengan kehidupan anak.

Kurikulum merdeka belajar pada tahun 2023 di SDN 2 Sokaraja Tengah dilaksanakan secara bertahap dengan pengimplementasian pada kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila bertujuan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari isu-isu penting dan mengembangkan profil pelajar Pancasila melalui berbagai proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Ada beberapa tema P5 yang telah ditetapkan Kemendikbud untuk jenjang SD diantaranya: Gaya Hidup Berkelanjutan, Kearifan Lokal, Bhineka Tunggal Ika, Bangunlah Jiwa dan Raganya, Rekayasa dan Teknologi, dan Kewirausahaan, di mana SDN 2 Sokaraja Tengah pada tahun 2023 semester dua menerapkan tema kearifan lokal berdasarkan kesepakatan kepala sekolah bersama guru dengan melihat kebutuhan peserta didik dan kondisi lingkungan sekolah. Selain itu Kemendikbud menetapkan 6 Dimensi diantaranya, Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berkebinekaan Global, Bergotong Royong, Mandiri, Bernalar kritis, dan Kreatif. SDN 2 Sokaraja Tengah hanya menerapkan tiga dimensi yaitu, beriman dan bertaqwa, berkebinekaan global, dan kreatif karena memang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan melalui kesepakatan bersama antara kepala sekolah dengan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN 2 Sokaraja Tengah dalam pengimplementasian P5 mengambil tema kearifan lokal dan menanamkan dimensi profil bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berkebinekaan global, dan kreatif. Berikut merupakan capaian Pembelajaran P5 tema kearifan lokal fase C di SDN 2 Sokaraja Tengah tahun 2023:

Tabel 7. Capaian Pembelajaran P5 Tema Kearifan Lokal Fase C di SDN 2 Sokaraja Tengah Tahun 2023

No	Dimensi	Elemen	Sub Elemen
1.	Beriman, Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia	Akhlak kepada alam	• MB: Mengenali beberapa contoh cara merawat lingkungan sekitar. • SB: Mampu mengidentifikasi beberapa kearifan lokal terkait pelestarian alam dan lingkungan. • BSH: Menunjukkan sikap peduli dan bertanggungjawab terhadap lingkungan sekitar berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang dipelajari. • SAB: Mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam, serta mengajak orang lain untuk berpartisipasi.
2.	Berkebinekaan Global	Mengenal dan Menghargai Budaya	• MB: Mengenali beberapa nama benda atau tradisi lokal dari daerahnya. • SB: Mampu menjelaskan secara sederhana beberapa ciri khas kearifan lokal • BSH: Menunjukkan rasa ingin tahu dan menghargai keberadaan kearifan lokal yang beragam di lingkungannya, serta mencoba memahami makna di baliknya • SAB: Aktif mencari tahu, mengapresiasi, dan mempromosikan kearifan lokal kepada teman atau keluarga, serta menyadari pentingnya pelestarian
3.	Kreatif	Menghasilkan Karya dan Tindakan Asli	• MB: Mampu membuat karya sederhana yang berkaitan dengan kearifan lokal dengan bantuan. • SB: Mampu menghasilkan karya atau ide sederhana yang terinspirasi dari kearifan lokal • BSH: Mampu mengembangkan gagasan dan menghasilkan karya yang lebih kompleks

-
- dan unik yang mencerminkan pemahaman terhadap kearifan lokal
 - SAB: Menunjukkan keberanian untuk bereksperimen dan berinovasi dalam menghasilkan karya orisinal yang mempromosikan atau menginterpretasikan kearifan lokal secara baru dan relevan
-

Sumber : Data diperoleh dari Informan

Kebijakan P5 tersebut sejalan dengan Visi dan Misi SDN 2 Sokaraja Tengah, yaitu membentuk peserta didik yang berkarakter Pancasila, berakhlak mulia, serta mampu mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari. Indikator untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam proses implementasi Kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SDN 2 Sokaraja Tengah dapat dianalisis menggunakan model implementasi George Edward III yang mencakup empat variabel utama, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Komunikasi Kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Komunikasi sebagai salah satu unsur penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Unsur komunikasi pada organisasi dilakukan dengan menjelaskan maksud dan sasaran kebijakan publik secara rinci sehingga rencana dan penerapan kebijakan dapat dioptimalkan. Setiap kebijakan publik tentunya akan ada pihak yang tidak sejalan dan perlu diantisipasi atau pihak yang resisten terhadap kebijakan yang dipilih. (Gede et al., 2022).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek komunikasi dalam kebijakan P5 di SDN 2 Sokaraja Tengah telah diterapkan dengan baik melalui tiga sub-aspek utama, yaitu kejelasan informasi, transmisi informasi, dan konsistensi penyampaian informasi. Kejelasan informasi yang disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana, terstruktur dengan baik, dan mudah dipahami. Pelaksanaan kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SDN 2 Sokaraja Tengah telah diupayakan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pelatihan, baik di tingkat gugus (KKG), sekolah, maupun melalui bimbingan teknis dari Dinas Pendidikan. Informasi tentang P5 disampaikan kepada guru melalui workshop, pertemuan KKG, media digital, serta koordinasi dengan pihak Korwil. Meskipun sudah ada pemahaman dasar dan SOP yang membantu pelaksanaan, pemahaman mendalam tentang P5 masih menjadi tantangan bagi sebagian guru karena terbatasnya waktu bimtek, kurangnya buku pedoman atau modul resmi, serta beragamnya interpretasi terhadap kebijakan tersebut.

Di sisi lain, penyampaian informasi kepada siswa dan orang tua sudah cukup jelas, meskipun masih terdapat kebutuhan akan penjelasan yang lebih rinci dan berkelanjutan mengenai tema, jadwal, dan peran orang tua dalam proyek. Beberapa wali murid memahami P5 sebagai pembentukan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila, namun berharap ada peningkatan komunikasi yang lebih sistematis dan berkala dari pihak sekolah. Secara umum, meskipun implementasi P5 mengalami berbagai tantangan, semangat untuk memahami, melaksanakan, dan mendukung kebijakan ini tetap tinggi di kalangan guru, siswa, dan orang tua. Hal ini mencerminkan pentingnya peningkatan literasi kebijakan melalui pelatihan yang lebih intensif, penyediaan sumber belajar yang memadai, serta komunikasi yang lebih efektif antara sekolah dan orang tua.

Transmisi informasi juga dilakukan dengan baik, melalui berbagai saluran komunikasi, Proses komunikasi kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SDN 2 Sokaraja Tengah berlangsung secara bertahap dan multi-arah, dimulai dari pemerintah pusat

ke Dinas Pendidikan Kabupaten, dilanjutkan ke Koordinator Wilayah (Korwil), kemudian diturunkan melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) kepada para guru di sekolah.

Setelah guru menerima informasi melalui bimtek, sosialisasi, atau workshop, mereka mengkoordinasikan pelaksanaan program bersama kepala sekolah dan menyusun program serta tema P5 yang akan dilaksanakan. Penyampaian informasi kepada siswa dilakukan secara langsung di dalam kelas, terutama saat pembelajaran tematik atau khusus di hari pelaksanaan P5, yakni setiap hari Kamis secara serempak. Media presentasi seperti PPT dan lembar tugas digunakan untuk membantu siswa memahami tema dan tujuan kegiatan. Adapun komunikasi kepada orang tua dilakukan secara tidak langsung melalui perwakilan paguyuban kelas dan grup WhatsApp. Sekolah juga mengadakan pertemuan atau rapat terbatas dengan pengurus paguyuban untuk menyampaikan informasi program secara kolektif. Meskipun informasi sudah disampaikan, sebagian wali murid mengungkapkan bahwa komunikasi belum sepenuhnya merata atau rutin, sehingga mereka mengandalkan pemberitahuan siswa atau pemberitahuan dari guru secara berkala.

Selain itu, konsistensi dalam penyampaian informasi. Pelaksanaan komunikasi kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SDN 2 Sokaraja Tengah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap konsistensi dan efektivitas informasi. Strategi komunikasi dilakukan melalui koordinasi rutin antara tim P5, kepala sekolah, guru, dan wali kelas. Setiap awal pelaksanaan tema P5, sekolah menyusun rencana terstruktur melalui rapat koordinasi, penyusunan panduan tertulis, serta pembagian jadwal kegiatan kepada seluruh pihak terkait. Penyampaian informasi kepada siswa dilakukan langsung oleh guru di kelas menggunakan media yang variatif seperti presentasi, cerita, gambar, dan video, untuk memastikan siswa memahami tema dan tugas yang harus dilakukan. Bagi wali murid, sekolah mengoptimalkan media komunikasi digital seperti grup WhatsApp serta kegiatan paguyuban kelas untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan P5, termasuk tugas siswa dan peran pendampingan orang tua di rumah. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu, perbedaan pemahaman antar guru, dan tidak semua orang tua memiliki akses informasi yang sama, Upaya pendampingan secara berkala terus dilakukan. Praktik komunikasi dua arah juga dijaga, baik melalui forum wali murid maupun respons langsung dari guru ketika ada pertanyaan atau kebingungan dari orang tua. Secara keseluruhan, sistem komunikasi P5 di SDN 2 Sokaraja Tengah tergolong adaptif dan kolaboratif, dengan mengikutsertakan semua pihak yang terlibat. Upaya ini mendukung keberhasilan pelaksanaan P5 sebagai bagian integral dari Kurikulum Merdeka untuk membentuk karakter siswa berprofil Pancasila.

Dalam pelaksanaannya, bentuk komunikasi yang diterapkan juga mencerminkan pola komunikasi top-down, dimana kebijakan, arahan strategis, informasi yang jelas, serta program berasal dari pusat, yaitu Dinas Pendidikan. Informasi dan instruksi tersebut kemudian diturunkan secara berjenjang melalui Korwil Kecamatan, kemudian disampaikan ke KKG. Melalui pola ini, guru berperan sebagai pelaksana kebijakan yang memastikan bahwa pesan, program, dan tujuan dari Pemerintah tersampaikan secara konsisten dan terarah kepada masyarakat di wilayahnya. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Noho Nani (2021) yang mengungkapkan bahwa dalam implementasi kebijakan pendidikan, komunikasi formal menjadi kunci untuk efektivitas distribusi instruksi dari tingkat atas ke bawah. Hal ini mencakup komunikasi antara atasan (Dinas) dengan bawahan (sekolah, Korwil, guru) serta birokrasi dan masyarakat penerima layanan Pendidikan.



Gambar 1. Pola Komunikasi Top Down SDN 2 Sokaraja Tengah

Sumber : Data diperoleh dari Informan

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari informan pada saat penelitian dengan mengamati kondisi sekitar maka dapat disimpulkan bahwa, SDN 2 Sokaraja Tengah dalam aspek komunikasi pada implementasi kebijakan P5 sudah berjalan dengan baik dan efektif, walaupun terkendala dengan kurangnya pemahaman P5, informasi tersampaikan dengan jelas. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Sari, A. P., Zumrotun, E., & Sofiana, N. (2023), yang mengungkapkan bahwa komunikasi menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan P5. Walaupun guru dan siswa masih menghadapi keterbatasan pemahaman, informasi dan arahan yang disampaikan melalui komunikasi efektif terbukti dapat membantu kelancaran pelaksanaan proyek.

Sumber Daya Pendukung Kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Dalam melaksanakan kebijakan publik yang dipilih pemerintah perlu dukungan sumber daya yang memadai. Sumber daya dapat berupa tugas dan fungsi, kewenangan, pegawai (personel), keuangan, informasi serta sarana dan prasarana antara lain: gedung, peralatan, lahan dan perlengkapannya (Gede et al., 2022).

1. Sumber Daya Manusia Dalam Pelaksanaan Kebijakan P5

Pelaksanaan kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SDN 02 Sokaraja Tengah menunjukkan progres positif dalam aspek ketersediaan tenaga pendidik dan semangat kolaborasi antar guru. Secara kuantitatif, jumlah guru dinilai cukup dan didukung oleh pembagian tugas yang proporsional, termasuk keterlibatan guru mata pelajaran dalam kegiatan berbasis nilai-nilai karakter seperti literasi Asmaul Husna, hafalan suratan pendek, dan pelaksanaan salat dhuha. Dari segi kesiapan, sekolah secara aktif meningkatkan kapasitas guru melalui pelatihan, pendampingan, forum diskusi, dan rapat koordinasi sebelum pelaksanaan proyek. Meskipun demikian, implementasi P5 belum berjalan secara maksimal. Tantangan utama terletak pada keterbatasan pemahaman guru terhadap konsep dan teknis pelaksanaan P5, minimnya modul ajar atau panduan yang jelas, serta alokasi waktu yang terkadang tergeser oleh mata pelajaran lain.

Terdapat variasi dalam kecakapan guru, sebagian telah menunjukkan kompetensi dan inisiatif tinggi, sementara yang lain masih dalam tahap penyesuaian. Guru secara umum menunjukkan antusiasme, namun masih memerlukan penguatan dalam merancang pembelajaran berbasis dimensi Profil Pelajar Pancasila secara kontekstual. Dukungan dari orang tua dan siswa menunjukkan bahwa guru telah berperan aktif dan komunikatif dalam membimbing siswa, meskipun proses pemahaman terhadap P5 di tingkat peserta didik juga masih memerlukan pendampingan. Oleh karena itu, keberlanjutan pelatihan, penyediaan modul yang fungsional, serta evaluasi rutin menjadi penting untuk meningkatkan kualitas implementasi P5 secara menyeluruh di sekolah.

2. Sumber Anggaran

Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SDN 2 Sokaraja Tengah didukung oleh alokasi anggaran yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta partisipasi dari wali murid. Penggunaan dana BOS disesuaikan dengan

kebutuhan masing-masing tema P5, seperti pengadaan alat, bahan, dan media pembelajaran. Meskipun tidak terdapat anggaran khusus dari pemerintah secara terpisah untuk P5, pihak sekolah melakukan pengalokasian secara internal berdasarkan perencanaan yang disusun dalam RKAS.

Selain itu, keterlibatan orang tua menjadi elemen penting dalam mendukung pembiayaan kegiatan P5, baik melalui kontribusi langsung maupun melalui komunikasi yang difasilitasi oleh guru dan paguyuban wali murid. Pemberitahuan mengenai kebutuhan dana dilakukan secara informal melalui siswa atau surat resmi dari sekolah. Proses pengelolaan anggaran dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, dengan pelaporan dan evaluasi berkala kepada pihak terkait, termasuk saat pertemuan dengan orang tua. Secara umum, model pendanaan P5 di sekolah ini mencerminkan prinsip kolaboratif antara sekolah dan orang tua, namun masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi sosialisasi, standar pembiayaan, serta kejelasan porsi tanggung jawab antara sekolah dan orang tua.

3. Fasilitas Sarana Dan Prasarana

Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SDN 2 Sokaraja Tengah masih menghadapi tantangan dari aspek sarana dan prasarana. Fasilitas pendukung seperti ruang terbuka, alat praktik, media pembelajaran kreatif, dan bahan proyek masih terbatas, sehingga belum sepenuhnya mampu menunjang kegiatan P5 secara optimal. Keterbatasan ini berdampak pada pelaksanaan proyek- proyek kolaboratif yang menuntut ruang dan peralatan khusus. Meskipun demikian, pihak sekolah menunjukkan komitmen dan inovasi dalam mengatasi hambatan tersebut. Guru dan siswa diarahkan untuk memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara maksimal dan mendorong pendekatan kreatif dalam pembelajaran. Selain itu, komunikasi aktif dengan komite sekolah serta kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat menjadi strategi untuk memenuhi kebutuhan sarana secara bertahap. Secara keseluruhan, keterbatasan infrastruktur bukan menjadi penghalang utama, namun tetap menjadi faktor penting yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut agar implementasi P5 dapat berjalan lebih efektif, kontekstual, dan berdampak pada penguatan karakter peserta didik.

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari informan pada saat penelitian dengan mengamati kondisi sekitar maka dapat disimpulkan bahwa SDN 2 Sokaraja Tengah dalam aspek sumber daya pada Implementasi Kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada sub aspek mengenai sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan P5 untuk jumlah guru dinilai mencukupi dan pelibatan mereka dalam kegiatan berbasis nilai karakter telah berjalan dengan baik, namun demikian, implementasi P5 belum maksimal. Tantangan utama mencakup rendahnya pemahaman konseptual dan teknis sebagian guru, keterbatasan modul ajar, serta alokasi waktu yang bersaing dengan pelajaran lain. Sementara itu, untuk sumber anggaran yang tersedia di SDN 2 Sokaraja Tengah mengandalkan alokasi internal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta kontribusi dari wali murid. Penggunaan dana BOS disesuaikan dengan kebutuhan tematik P5 dan direncanakan melalui RKAS, meskipun tidak terdapat anggaran khusus dari pemerintah untuk P5. Kemudian terkait fasilitas sarana dan prasarana di SDN 2 Sokaraja Tengah Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SDN 2 Sokaraja Tengah masih terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana, seperti ruang terbuka, alat praktik, dan media pembelajaran. Kondisi ini memengaruhi optimalisasi kegiatan proyek, terutama yang bersifat kolaboratif dan kontekstual. Namun, sekolah menunjukkan komitmen untuk mengatasi hambatan tersebut melalui pemanfaatan fasilitas yang ada secara kreatif, serta menjalin kerja sama dengan komite sekolah, orang tua, dan masyarakat. Keterbatasan infrastruktur bukan menjadi penghalang utama, namun tetap menjadi aspek krusial yang perlu diperkuat guna mendukung efektivitas dan keberlanjutan implementasi P5 dalam membentuk karakter peserta didik. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Melati, P et.al (2024) yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan

P5 sering menghadapi tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, serta pemahaman guru yang belum merata. Meskipun demikian, sekolah dapat mengatasi hambatan tersebut melalui pemanfaatan fasilitas yang ada secara kreatif dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Disposisi Pelaku Kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Disposisi, dalam melaksanakan kebijakan publik juga dipengaruhi sikap serta komitmen pihak yang melaksanakan kebijakan yaitu pegawai yang melaksanakan, yang ditunjukkan oleh pemahaman atas langkah-langkah yang dikerjakan dan mempunyai kemampuan untuk mengerjakan serta kesamaan pemahaman dalam penerapan kebijakan publik. Jadi unsur sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan diharapkan mampu dilaksanakan sejak tahap awal pelayanan, ketersediaan peraturan dan penegakan hukum (Gede et al., 2022).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa pemimpin di SDN 2 Sokaraja Tengah menunjukkan komitmen yang tinggi dan konsisten dalam mendukung implementasi kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Dukungan tersebut tercermin melalui peran aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, serta dorongan terhadap kolaborasi antar guru dan partisipasi orang tua. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan sarana prasarana dan kebutuhan peningkatan pemahaman guru, kepala sekolah tetap berupaya menciptakan lingkungan kerja yang positif dan fasilitatif. Komitmen ini menjadi penguat utama bagi keberlangsungan P5 di sekolah, sekaligus berkontribusi terhadap pembentukan karakter siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, sikap perilaku kepala SDN 2 Sokaraja Tengah, pendik, siswa, dan wali murid sangat mendukung, P5 dipandang sebagai upaya strategis dalam membentuk karakter peserta didik secara holistik, meliputi dimensi spiritual, sosial, emosional, dan kognitif yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Program ini memberi ruang bagi pembelajaran kontekstual, kolaboratif, dan aktif, seperti melalui kegiatan outing class dan proyek akhir semester. Meskipun implementasi masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal keterbatasan sarana dan pemahaman P5, seluruh pihak menunjukkan komitmen, antusiasme, dan partisipasi aktif. Hal ini menjadikan P5 sebagai bagian penting dalam memperkuat pendidikan karakter yang relevan dan bermakna di tingkat sekolah dasar.

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari informan pada saat penelitian dengan mengamati kondisi sekitar maka dapat disimpulkan bahwa SDN 2 Sokaraja Tengah dalam aspek disposisi pada Implementasi Kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila sudah berjalan dengan baik dan mendukung keberhasilan kebijakan P5 di SDN 2 Soaraja Tengah. Walaupun masih terkendala pada sarana dan prasarana dan pemahaman P5. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Yuhana, L at.al (2025) yang menunjukan bahwa implementasi P5 sebagai bentuk penguatan karakter gotong royong siswa melalui tema kewirausahaan di SMP Negeri 16 Pontianak juga berhasil berkat dukungan disposisi positif dari kepala sekolah dan guru. Mereka terlibat aktif dalam semua tahap pelaksanaan P5, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, meskipun menghadapi kendala seperti keterbatasan fasilitas pendukung dan pemahaman P5.

Struktur Birokrasi Dalam Kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Struktur Organisasi, kebijakan publik dapat dilaksanakan apabila ada kewenangan yang diberikan kepada pelaksana, oleh karena itu perlu adanya struktur birokrasi yang rinci pada organisasi. Dalam struktur organisasi yang menjadi pelaksana kebijakan publik harus dilengkapi dengan standard operating procedure (SOP) secara rinci dan dapat dilaksanakan. SOP ini digunakan sebagai pedoman bagi organisasi maupun bagi masyarakat untuk mengukur penerapan kebijakan yang dipilih. Selain itu SOP juga perlu mempertimbangkan

tingkat kemudahan dan kesederhanaan administrasi sehingga dapat diterapkan secara efektif dan efisien (Gede et al., 2022).

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelitian yang sudah dilakukan bahwa di SDN 2 Sokaraja Tengah, pelaksanaan tugas dalam kebijakan P5 sudah dilaksanakan dengan jelas dan terstruktur, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan SOP yang telah ditetapkan. Berdasarkan pernyataan berbagai pihak, dapat disimpulkan bahwa SDN 2 Sokaraja Tengah telah memiliki dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan sistematis dalam pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). SOP ini menjadi acuan teknis bagi guru dan tim pelaksana dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan P5 secara terarah dan konsisten. Keberadaan SOP membantu dalam membagi peran guru, menentukan tema, menyusun langkah- langkah proyek, serta mendokumentasikan hasil kegiatan. Meskipun sebagian warga sekolah, khususnya peserta didik dan beberapa wali murid, belum sepenuhnya memahami detail SOP, pelaksanaan P5 yang tertib dan terstruktur mencerminkan bahwa pedoman tersebut telah diimplementasikan secara efektif di lingkungan sekolah. Berikut adalah SOP modul ajar tema kearifan lokal Fase C di SDN 2 Sokaraja Tengah Tahun 2023:



Gambar 2. SOP Modul Ajar Tema Kearifan Lokal Fase C Alur Pelaksanaan Proyek SDN 2 Sokaraja Tengah Tahun 2023

Sumber : Data diperoleh dari Informan

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, struktur organisasi SDN 2 Sokaraja Tengah sebagai pelaksana IKM pada P5 adalah sebagai berikut:



Sumber : Data diperoleh dari Informan

Gambar di atas menunjukkan bagaimana struktur organisasi di SDN 2 Sokaraja Tengah yang mana telah sesuai dengan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Terdiri dari Kepala Sekolah sebagai pimpinan yang bertanggungjawab atas segala pengelolaan dan

pengembangan kegiatan di sekolah. Di bawah kepala sekolah terdapat kelompok jabatan pelaksana yaitu tata usaha, bendahara dan penjaga. Pada saat ini jabatan tata usaha belum diisi, hal ini karena guru yang bertugas sebagai tata usaha telah dimutasi dan belum ada pembentukan struktur organisasi yang baru. Selanjutnya terdapat jabatan fungsional yang terdiri dari perpustakaan, guru kelas 1-6, KKG P5, guru Mapel PAI, Pembina Pramuka dan Pembina UKS.

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari informan pada saat penelitian dengan mengamati kondisi sekitar maka dapat disimpulkan bahwa SDN 2 Sokaraja Tengah dalam aspek struktur birokrasi pada Implementasi Kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) sudah cukup baik. SDN 2 Sokaraja Tengah telah melaksanakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) secara tertib dan terstruktur berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan sistematis. SOP tersebut menjadi pedoman teknis bagi guru dan tim pelaksana dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan P5, meskipun belum seluruh warga sekolah memahami detailnya. Implementasi SOP ini menunjukkan pelaksanaan P5 yang efektif sesuai ketentuan yang berlaku. SDN 2 Sokaraja Tengah juga terdapat struktur organisasi yang jelas. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Pebru Alim Tufando (2024) di SMP Negeri 3 Pandan menunjukkan bahwa keberadaan SOP yang sesuai dengan Kurikulum Merdeka dan struktur birokrasi yang baik berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi P5. SOP tersebut menjadi pedoman teknis bagi guru dan tim pelaksana dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan P5 secara terarah dan konsisten.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) adalah:

1. Aspek Komunikasi, komunikasi kebijakan P5 telah diterapkan secara cukup efektif melalui kejelasan informasi, transmisi yang berjenjang dan multi-arah, serta konsistensi penyampaian. Sekolah memanfaatkan berbagai media dan forum untuk menyosialisasikan kebijakan kepada guru, siswa, dan orang tua. Namun, keterbatasan waktu pelatihan, kurangnya modul resmi, serta ketimpangan akses informasi di kalangan wali murid menunjukkan perlunya penguatan literasi kebijakan dan peningkatan intensitas komunikasi dua arah secara lebih sistematis.
2. Aspek Sumber Daya, dukungan sumber daya manusia tergolong memadai dari sisi kuantitas dan kolaborasi antar guru. Pelatihan dan forum diskusi telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru, meskipun masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan P5. Pendanaan kegiatan berasal dari dana BOS dan partisipasi wali murid yang dikelola secara transparan, namun masih menghadapi kendala dalam hal sosialisasi standar pembiayaan dan kejelasan peran. Sementara itu, keterbatasan sarana dan prasarana masih menjadi hambatan teknis yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan proyek.
3. Aspek Disposisi, komitmen kepala sekolah dan seluruh warga sekolah terhadap P5 sangat kuat. Kepala sekolah berperan aktif dalam semua tahapan implementasi dan memfasilitasi kolaborasi serta inovasi. Sikap positif dan partisipatif dari guru, siswa, dan wali murid menunjukkan bahwa P5 dipahami sebagai sarana strategis dalam pembentukan karakter siswa secara holistik berbasis nilai-nilai Pancasila, meskipun masih diperlukan penguatan dalam aspek pemahaman konseptual dan teknis.
4. Aspek Struktur Birokrasi, struktur pelaksanaan P5 di SDN 2 Sokaraja Tengah telah berjalan sesuai prosedur yang baku dan sistematis melalui penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan

proyek, termasuk pembagian peran, perencanaan, hingga evaluasi. Walaupun sebagian warga sekolah belum memahami isi SOP secara mendalam, pelaksanaan program yang tertib mencerminkan bahwa struktur organisasi dan tata kelola telah diimplementasikan secara fungsional dan efektif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis merekomendasikan agar implementasi Kebijakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SDN 2 Sokaraja Tengah memperkuat beberapa strategi yang tepat. Dalam aspek komunikasi, diperlukan peningkatan pemahaman kebijakan secara menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya wali murid, melalui penyusunan modul resmi dan pelatihan berkala serta optimalisasi komunikasi dua arah secara sistematis. Pada aspek sumber daya, disarankan untuk menyesuaikan pemahaman dan keterampilan guru dalam menerapkan P5 melalui mentoring dengan coordinator P5, serta memperjelas nominal anggaran kegiatan P5 kepada orang tua guna meningkatkan transparansi dan partisipasi. Selain itu, fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang harus segera ditindak lanjuti guna memperlancar pelaksanaan P5. Dalam aspek disposisi, meskipun semangat dan komitmen warga sekolah sudah tinggi, tetap dibutuhkan penguatan pemahaman konseptual dan teknis tentang P5 agar implementasinya tidak hanya semangat, tetapi juga berkualitas. Terakhir, pada aspek struktur organisasi, disarankan dilakukan sosialisasi dan pendalaman pemahaman terhadap SOP kepada seluruh elemen sekolah agar pelaksanaan proyek tidak hanya berjalan tertib, tetapi juga sepenuhnya dipahami dan dijalankan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Ilmiah

- Alhasni, R. A., & Fitri Herawati, M. (2024). Buku Ajar Kebijakan Publik.
- Asya Ainul Fitri, Lilif Muallifatul Khorida Filasofa, & Agus Sutiyono. (2024). Implementasi Penguatan Profil Pelajar Pancasila melalui Project Based Learning untuk Anak Usia Dini. Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 5(1), 239–252. <https://doi.org/10.19105/kiddo.v5i1.12379>
- Azizah. (2016). Analisis Hojodoushi Iku Dan Kuru Sebagai Ungkapan Yang Menyatakan Aspek Bentu–Teiku Dan - Tekuru.
- Cahyo, E. D. (2017). Pendidikan Karakter Guna Menanggulangi Dekadensi Moral Yang Terjadi Pada Siswa Sekolah Dasar. In Januari (Vol. 9, Issue 1).
- Gede, I., Chahya Bayu, K., Kusuma, A., Keuangan, P., Stan, N., Theo, Y., Simanungkalit, S., Pajak, J., Korespondensi, A., & Id, I. A. (2022). Implementasi Insentif Pajak Menurut Model G Edward III.
- Gentala, J., & Dasar, P. (2016). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada Siswa Sekolah Dasar Article Information. 1(Desember), 251–274. <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/gentala>
- Ikbal. (2024). Teori administrasi publik. Retrieved November 5, 2024
- Kertati, I., Pratomo, S., Sancono, B. A. W., Daeni, M., Widyastomo, R. P., Christiani, C., ... & Wirasati, W. (2023). Implementasi Kebijakan Publik: Dari Hulu ke Hilir. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Lestari, D., Asbary, M., & Yani, E. E. (2023). Kurikulum Merdeka: Hakikat Kurikulum dalam Pendidikan. Journal Of Information Systems And Management, 02(05), 85.
- Maruti, E. S., Malawi, I., Hanif, M., Budyartati, S., Huda, N., Kusuma, W., & Khoironi, M. (2023). Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada Jenjang Sekolah Dasar. 2(2), 85–90. <https://doi.org/10.31764/justek.vXiY.ZZZ>
- Melati, P. D., Rini, E. P., Musyayyadah, M., & Firman, F. (2024). Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Menengah Atas (SMA). Edukatif. Jurnal Ilmu Pendidikan, 6(4), 2808-2819.

- Nasution. (2023). Metode Penelitian Kualitatif.
- Nugraha, B., Eka, P., Kadek, P., Dwi, W., Rudi, W., Imas, M., Indah, S., Maesarini, Nur. (2021). Analisis Kebijakan Publik. <https://www.researchgate.net/publication/350619992>
- Pramesti, A., Evangelyne, G., & Krulbin, A. N. (2024). Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) dalam Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 1(3), 8. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.318>
- Putri Kholifah, E., Setiawan, F., & Lahdilah Fitri, N. (2022). Implementasi Kebijakan Pendidikan (Vol. 4, Issue 2).
- Rahayu, L., Junita, A., Fiani, F. R., Putra, M. J. A., & Sari, M. Y. (2024). Kesiapan Guru dalam Mengimplentasikan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) pada Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Kearifan Lokal*, 4(5), 475-485.
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6313–6319. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237>
- Ridhayana, C., Putra, W. S., & Artikel, I. (2023). Implementasi Kebijakan Pendidikan. In *Journal Of International Multidisciplinary Research*.
- Sitna. (2022). buku pengantar administrasi publik. 69–73.
- Sos, J. P. S. (2020). Implementasi dan evaluasi kebijakan publik. Unisri Press. Sutapa, M. (2008). *Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik*.
- Sutikno, C. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Langgongsari Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. *Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)*, 17(2), 1-9.
- Sutikno, C. (2022) Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tamansari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 7, 683-693.
- Sutikno, C., Pribadi, I. A. P., Atika, Z. R., & Amanda, A. (2023). Implementasi kebijakan program keluarga harapan (pkh) di desa gununglurah kecamatan cilongok kabupaten banyumas. *Musamus Journal of Public Administration*, 5(2), 267-280.
- TEORI ADMINISTRASI. www.globaleksektifteknologi.co.id
- Titi Rawati Gulo, Rosalia Mendrofa, & Elazhari. (2024). Implementasi Kebijakan Publik Serta Terhadap Kepentingan Publik Berdasarkan Teori Administri Negara Saat Ini. 15.
- Tri Siti Eliyanti, E. (2024). Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Sekolah Dasar (Vol. 7, Issue 2). <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id>
- W., Taqwaty, R., Asri, F., Iwan, K., Kusnadi, H., & Hendrayady, A. (2022).
- William. (2022). *ADMINISTRASI PUBLIK (Teori dan Pergeseran Paradigma ke era Digital)*. Retrieved January 30, 2025
- Yuhana, L., Nursalim, M., Hazin, M., & Khamidi, A. (2025). Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Di UPT SMPN 33 Gresik. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(01), 1-15